

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Oleh
Sitoresmi Dyah Santika
Pembimbing: Dr. Aman, M.Pd.

ABSTRAK

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 sangatlah penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk 1) mengetahui dan mengkaji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebelum Masa Demokrasi Terpimpin, 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin, 3) Dinamika perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin, 4) Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah kritis. Penelitian sejarah kritis ini terdiri dari lima tahapan. Tahap pertama adalah pemilihan topik yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Tahap kedua adalah pencarian dan pengumpulan sumber (*heuristik*) yaitu mengumpulkan sumber-sumber baik mengkaji buku-buku yang relevan, arsip, koran, ataupun sumber sejarah lainnya. Tahap ketiga adalah kritik sumber (*verifikasi*) dimana penulis meneliti sumber yang diperoleh baik ekstern maupun intern sehingga diperoleh data yang dipertanggungjawabkan. Tahap keempat adalah penafsiran (*interpretasi*) dan tahap kelima adalah penulisan sejarah (*historiografi*) yaitu dimana penulis menyajikan hasil penafsiran tersebut secara kronologis dan deskriptif analitis dalam bentuk sejarah.

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan dalam organisasi maupun status Kepolisian. Selain itu Kepolisian Negara berperan dalam operasi keamanan dalam negeri seperti menumpas sisa-sisa kolonial Belanda, operasi penumpasan APRA, PRRI Permesta, dan DI/TII di Sulawesi dan Jawa, 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin merupakan lembaga negara yang mengalami perubahan dan perkembangan pada masa tersebut, 3) dinamika Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lahirnya UU Pokok Kepolisian No.13/1961, Integrasi Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Organisasi Kepolisian, dan Perkembangan Pendidikan Kepolisian Negara, 4) Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam operasi-operasi Penumpasan DI/TII di Sulawesi Dan Jawa Barat, Trikora, Dwikora, penumpasan G30S, serta tugas Kepolisian dalam melindungi Presiden.

Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Demokrasi Terpimpin, 1959-1965

PENDAHULUAN

Babak akhir pemerintahan orde lama¹ adalah periode demokrasi terpimpin². Demokrasi terpimpin lahir karena kegagalan kabinet Djuanda³ yang mengakibatkan pertentangan politik maupun ideologi dalam pemerintahan yang kemudian muncullah suatu konsepsi dari Presiden Soekarno yaitu “demokrasi terpimpin”. Untuk melaksanakan konsepsi dari Presiden Soekarno tersebut, Djuanda mengusulkan untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 kembali diberlakukan dan ditambah dengan beberapa poin-poin penting. Usul dari Djuanda pun diterima oleh Presiden Soekarno yang kemudian Presiden membicarakan masalah tersebut dengan Mr. Moh Yamin, Mayjen Nasution dan Dr. Lemeina. Usul dari Djuanda tersebut juga disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Menteri kabinet, dan juga partai-partai besar seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), NU (Nathadul Ulama), Masyumi, serta partai-partai kecil lainnya.

Keadaan konstituante yang carut marut karena tidak ditemukannya mayoritas suara dalam pemungutan suara mengakibatkan ketegangan politik dalam konstituante yang mengakibatkan konstituante harus dibubarkan. Pembubaran konstituante ditakutkan dapat mengakibatkan carut marutnya keadaan dalam masyarakat. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang ditandatangani pada 5 Juli 1959. Dekrit presiden 5 Juli 1959 mengubah secara mendasar struktur tata pemerintahan negara. Dekrit tersebut memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS. Sedangkan kabinet presidensial pertama adalah kabinet Karya yang disertai dengan pembentukan departemen-departemen baru dalam pemerintahan. Perubahan struktur negara juga mengakibatkan perubahan dalam struktur organisasi Kepolisian Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bidang pertahanan dalam negeri yang sudah ada sejak lama. Kepolisian sudah ada sejak jaman Hindia-Belanda, namun pada saat itu terdapat perbedaan antara polisi pribumi dengan polisi Belanda. Jaman Jepang jumlah polisi pribumi lebih banyak dari pada jaman Hindia-Belanda, bahkan setiap kantor polisi dikepalai oleh seorang polisi pribumi

¹ Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno (1945-1965). Istilah ini baru dicetuskan ketika pemerintahan Soeharto atau disebut juga Orde Baru yang merupakan pemerintahan setelah Orde Lama.

² Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah bentuk pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi.

³ Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir periode demokrasi parlementer. Demokrasi Parlementer merupakan periode pemerintahan sebelum Demokrasi Terpimpin.

namun tetap didampingi oleh polisi senior Jepang.⁴ Militerisasi dalam Angkatan Kepolisian sudah dilakukan sejak masa Jepang, namun dalam periode Demokrasi Terpimpin militerisasi lebih ditegaskan dengan Keputusan Presiden yang tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 160, 1960.⁵ Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahir pula “*Polisi Pedjoang*” yang ikut serta dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, polisi bersama dengan masyarakat saling membantu dalam menjaga keamanan negara.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam perjalannya mengalami perubahan dalam organisasi, status, fungsi maupun tugasnya. Fungsi maupun peran serta kepolisian pada masa Demokrasi terpimpin dalam keamanan negara sangatlah luas. Polri berperan dalam operasi Kamdagri yaitu operasi penumpasan DI/TII di Sulawesi maupun di Jawa Barat. Selain itu dalam operasi Trikora dan Dwikora, sebagai anggota ABRI Polri juga berperan dalam operasi tersebut. Polri juga bertugas melindungi Presiden pada masa demokrasi terpimpin. Dan di pertengahan tahun 1965 ketika meletusnya pemberontakan G30S, Polri berperan dan berfungsi untuk andil dalam penumpasan pemberontakan tersebut.⁶

Perkembangan Kepolisian Negara pada masa demokrasi terpimpin dapat dimulai ketika berakhirnya masa jabatan R.S Soekanto. Lahirnya UU Pokok tentang Kepolisian No. 13/1961 serta perkembangan P3RI dan kekarayaan Polri juga berlangsung pada masa demokrasi terrpimpin. Dan yang paling tersorot dalam perkembangan Kepolisian negara pada masa ini adalah Integrasi Kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahap dalam proses penelitian sejarah, terdiri dari tahap Pemilihan Topik, Heuristik (Pengumpulan Sumber), Verivikasi (Kritik

⁴ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. *Almanak Seperempat Abad Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 1970, hlm. 177.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia. *Militerisasi Kepolisian Negara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1960, hlm. 834.

⁶Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 274.

⁷*Ibid*, hlm. 296.

Sumber), Interpretasi dan Penulisan Sejarah (historiografi, penjelasan, penyajian).⁸Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik, sosial, hukum dan militer.. Dalam deskripsi ini, pendekatan politik merupakan bermacam-macam tindakan yang dilakukan dalam sistem guna mencapai tujuan.⁹ pendekatan ilmu politik adalah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan concensus rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik dan sebagainya.¹⁰ Pendekatan Sosial pada penulisan ini digunakan untuk dapat menelaah berbagai peristiwa sejarah. Sejarah juga berperan dalam menjalankan aktivitas kolektif manusia pada masa lampau.. Pendekatan hukum pada penulisan ini digunakan untuk mengetahui penetapan-penetapan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku secara universal. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Undang-undang keputusan presiden dan keputusan-keputusan pemerintah yang mengatur struktur organisasi lembaga kepolisian selain sebagai penegak hukum polisi juga memelihara keamanan dan ketertiban negeri. Pendekatan militer digunakan untuk menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan perang untuk menentukan baik buruk serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara. Dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu negara¹¹.

PEMBAHASAN

Berakhirnya masa Republik Indonesia Serikat (RIS) mempengaruhi keberadaan organisasi Kepolisian yang disesuaikan dengan konstitusi negara. Peleburan jawatan-jawatan Kepolisian RIS dan jawatan Kepolisian negara bagian menjadi satu menghasilkan organisasi Kepolisian untuk seluruh Indonesia. Namanyapun berubah dari Jawatan Kepolisian Indonesia menjadi Jawatan Kepolisian Negara . Kantor pusat tetap berada pada satu gedung dengan Kementrian Dalam Negeri di Jalan Sagara No. 7 Jakarta.¹² Sehingga pada pusat

⁸Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003, hlm. xix.

⁹Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia. 2008, hlm. 12.

¹⁰Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah, op.cit.* hlm. 172.

¹¹Sayidiman Suryohadiprojo. *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang*. Jakarta: Intermedia. 1981, hlm. 66.

¹² Jawatan Kepolisian Negara merupakan istilah nama untuk menggantikan Jawatan Kepolisian Indonesia. Jawatan Kepolisian Negara mulai digunakan ketika masa Republik Indonesia Serikat karena nama ini dirasa sangat

terdapat Jawatan Kepolisian Negara, yang kemudian tersusun pada tingkat bawahnya adalah Polisi Propinsi, Polisi Karesidenan, Polisi Kabupaten, Polisi Wilayah, Polisi Sub-Wilayah, dan Pos Polisi.

Sesuai dengan tradisi yang tumbuh setelah masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Kepolisian Negara diikutsertakan dalam operasi-operasi militer untuk menumpas peristiwa-peristiwa yang mengancam keamanan negara, khususnya kesatuan-kesatuan Mobile Brigade yang pada waktu itu telah terbentuk. Tugas-tugas yang dihadapkan Kepolisian pada waktu itu antara lain masalah penyelundupan antara Indonesia dengan semenanjung Malaya dan Filipina, masalah kejahatan-kejahatan internasional seperti obat bius, dan pemalsuan mata uang..

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Kepolisian Negara dihadapkan pada gejala-gejala meningkatnya kejahatan didaerah-daerah yang semakin meluas dan meliputi segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan militer. Partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan bahkan dalam tubuh lembaga pemerintahan berlomba-lomba merebutkan kedudukan dan lain-lain. Akibatnya disintegrasi terjadi menjalar dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat-akibat yang terjadi antara lain gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh pemberontakan APRA, DI/TII dan PRRI/Permesta.¹³

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengubah secara mendasar struktur dan tata pemerintahan negara. Dekrit presiden tersebut memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Sistem Kabinet Parlementer digantikan oleh sistem Kabinet Presidensial. Pergantian sistem pemerintahan ini membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan struktur dan organisasi negara salah satunya Kepolisian Negara. Kepolisian pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan dalam struktur maupun organisasinya. Perubahan yang terlihat dan sangat mendasar adalah pergantian Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto dengan Soekarno Djojonegoro.

Dalam bidang politik atau kekaryaan, Kepolisian juga mendapatkan jabatan diluar kepolisian. Sepetri menteri, duta besar dan lain sebagainya. Hal ini semakin meningkatkan kesejahteraan anggota Kepolisian yang tergabung Dalam

cocok daripada nama sebelumnya. Jawatan Kepolisian Negara tidak pula disebut dengan Jawatan Kepolisian RIS , karena penggunaan sebutan RIS menyatakan aliran federal ketika masa RIS, sedangkan pemakaian Indonesia tidak sesuai dengan susunan. Sehingga pada waktu itu dipikirkan sebutan Jawatan Kepolisian Negara.

¹³ Memet Tanumidjaja. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. 1971, hlm. 96.

P3RI.¹⁴ Namun Kepolisian tetap bekerja dan berjuang bersama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh Indonesia. Karena hal itu merupakan tujuan utama dibentuknya Lembaga Kepolisian Negara.

Masa Demokrasi Terpimpin juga merupakan masa dimana pendidikan Kepolisian mengalami perubahan. Perubahan yang ada merupakan perubahan yang progres. Karena pada masa ini Pendidikan Kepolisian membentuk sekolah untuk Polisi. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya Sekolah Polisi Negara (SPN), Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak).¹⁵

Kepolisian Negara pada masa Demokrasi terpimpin berperan dalam operasi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Operasi-operasi Keamanan tersebut adalah Operasi Penumpasan DI/TII Di Sulawesi dan Jawa Barat, Kemudian dalam Operasi Trikora di Irian Barat, Operasi Dwikora dalam konfrontasi melawan Malaysia, serta ikut andilnya Kepolisian dalam penumpasan G30S/PKI. Selain peran Kepolisian dalam operasi Kamdagri tersebut, Polisi juga berperan dan bertugas langsung dalam melindungi Presiden. Karena selama periode Demokrasi Terpimpin, terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Oleh sebab itu Kepolisian yang merupakan anggota dari ABRI juga bertugas untuk melindungi Presiden secara langsung.

Pada Perkembangan selanjutnya, Presiden RI mengeluarkan keputusan dalam Keputusan Presiden RI tanggal 31 Maret 1954, No 75/1954 tentang pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-Undang. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut maka dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dan sebagai anggota ahlinya adalah Prof. Mr. Djokosutono yang merupakan guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.¹⁶ Tugas panitia tersebut adalah meneliti dan menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan status Kepolisian. Pertengahan Agustus 1958 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pokok Kepolisian telah diserahkan kepada Kabinet Kerja. P3RI yang semula menolak tegas gagasan Gondokusuman, kemudian pada saat diteruskannya Rancangan Undang-Undang tersebut P3RI mendesak agar segera disahkan menjadi Undang-Undang. Desakan tersebut bertujuan untuk mempertegas status dan kedudukan Kepolisian Negara sebagai bagian dalam administrasi ketatanegaraan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1961 RUU Pokok Kepolisian tersebut disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dalam rapat Pleno terbuka ke-27 pada tanggal

¹⁴ ¹⁴Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3JES. 1986, hlm. 54.

¹⁵ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 322.

¹⁶ *Ibid*, hlm.303.

19 Juni 1961 di Jakarta.¹⁷ Setelah disetujui oleh DPRGR, UU Pokok Kepolisian tersebut kemudian diundangkan oleh Pejabat Presiden yang pada waktu itu dipegang oleh Menteri Pertama Djuanda pada tanggal 30 Juni 1961.

Integrasi Kepolisian ke dalam ABRI baru terlaksana pada tanggal 21 Juni 1962 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI No. 225/Plt/1962.¹⁸ Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa pimpinan Angkatan Bersenjata RI adalah Presiden /Panglima Tertinggi. Presiden dibantu oleh Staf Angkatan Bersenjata (KSAB).1). Kurangnya daya tampung

Kepolisian Negara merupakan bidang Pertahanan dan Keamanan Negara. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat serta membantu Presiden dalam mengamankan negara. Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan Kepolisian Negara. Sehingga Kepolisian juga memiliki tugas dan peran penting dalam Keamanan dan Pertahanan Negara. Pada tanggal 9 April 1962 keluar Keppres No. 134 tahun 1962.¹⁹ Dalam Keppres itu dinyatakan bahwa mulai tanggal 6 Maret 1962 nama Menteri/Kepala Kepolisian Negara/KKN diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menteri/Kasak) sesuai dengan pasal 3 UU Pokok Kepolisian No. 13/1960²⁰ yang menegaskan Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga status Kepolisian pada saat itu adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pada masa Jepang satuan polisi bersenjata tersebut dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keikatsu Tai.²¹ Tokubetsu Keikatsu Tai lahir karena adanya tuntutan perang pada masa pendudukan Jepang dalam rangka Perang Dunia II. Indonesia yang waktu itu merupakan negara jajahan Jepang memiliki andil besar dalam Perang Dunia II. Untuk menambah kekuatan militer Jepang, maka diperlukan kekuatan dari negara jajahan. Kekuatan tersebut berupa pengiriman pasukan baik dari pasukan PETA maupun Kepolisian. Sehingga dengan tuntutan tersebut Kepolisian waktu itu menciptakan sebuah satuan Kepolisian bersenjata dan memiliki keahlian seperti pasukan bersenjata lainnya. Satuan Kepolisian tersebut bernama Tokubetsu Keikatsu Tai yang kemudian disebut Brigade Mobil (Brimob) pada periode sekarang.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 304.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 306.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Atim Supomo. *Brimob Polri Jateng Dan DIY Dalam Lintasan Sejarah*. Semarang: Brigade Mobil Polda Jateng. 1996, hlm. 10.

Dalam perkembangannya, Mobiele Brigade memiliki perubahan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan serta memperkuat Korps Mobiele Brigade. Perkembangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Ranger (Pelopor)

Keberadaan Ranger yang kemudian berubah nama menjadi Pelopor tidak dapat dipisahkan dari Sekolah Pendidikan Mobiele Brigade (SPMB). SPMB lah yang menyiapkan segala keperluan untuk melahirkan Ranger. SPMB adalah lembaga Kepolisian yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi anggota Mobiele Brigade. Lembaga ini berkedudukan di Porong, Watukosek, Jawa Timur.²² Ranger diciptakan karena tuntutan Kepolisian seiring dengan maraknya berbagai bentuk pemberontakan di berbagai daerah. Dalam operasi penumpasan pemberontakan, banyak sekali anggota Mobrig yang gugur. Hal tersebut merupakan pukulan keras bagi Kepolisian. Sehingga dibentuklah satuan khusus dalam bentuk kecil didalam Mobrig yang memiliki kekuatan dan kualitas tinggi. Anggota Mobrig yang berkriteria ini diharapkan mampu meredam setiap pemberontakan maupun pergolakan.²³ Dari berbagai bentuk alternatif nama, maka dipilih Ranger, nama yang sama untuk satuan khusus Amerika.

Persiapan pertama yang dilakukan SPMB dalam pembentukan Ranger adalah membentuk tenaga-tenaga instruktur. Untuk membentuk tenaga instruktur yang berkualitas seperti Ranger luar negeri, maka SPMB menyeleksi para perwira instruktur yang kemudian dikirim ke luar negeri untuk melakukan studi banding sekaligus belajar berbagai pengetahuan yang belum ada didalam negeri. Tempat yang dipilih adalah Filipina dan Okinawa Jepang. Filipina dipilih karena keadaan alam yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sedangkan Okinawa Jepang dipilih karena di Okinawa merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang memiliki perwira dan instruktur angkatan darat Amerika yang berpengalaman. Selain itu dengan adanya hubungan dalam bidang pendidikan tersebut, maka anggota Ranger akan ditempatkan sementara di Honolulu Police Departement di Hawaii untuk belajar tentang keorganisasian, teknik operasi, dan penggunaan fasilitas kepolisian.

2. Pergantian Nama Mobiele Brigade menjadi Brigade Mobil

Pada tanggal 14 November 1961 sebutan Mobiele Brigade diganti oleh KKN dengan sebutan Korps Brigade Mobil. Kemudian sejak tanggal 14 November ditetapkan sebagai hari Brigade Mobil dan merupakan sebuah kehormatan bagi Korps Brigade Mobil khususnya dan Kepolisian Negara pada umumnya. Bertepatan dengan tanggal 14 November 1962, Brimob juga

²² Atim Supomo. *Pelopor*. Yogyakarta: Pusdik Brimob. 1998, hlm. 35.

²³ *Ibid*, hlm. 34.

dianugerahi penghargaan Nugraha Sakanti Jana Utama. Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk Brimob yang sudah lima belas tahun mengabdikan kepada negara sejak 14 November 1946. Dharma dan baktinya untuk negara mendapat pengakuan dan patut menjadi contoh dalam memelihara dan memajukan sifat-sifat kepolisian. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama kali untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 November 1964 yang merupakan hari ulang tahun ke-17 Brimob, Menpangak meresmikan berdirinya kesatuan Resimen Pelopor Brimob. Hal itu menunjukkan bahwa Brimob merupakan kesatuan yang kuat dan sangat berjasa bagi negara dengan pengabdianya.

Awal tahun enam puluhan merupakan masa dimana personil Polisi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian secara umum. Berhubung dengan jumlah personil polisi yang dihasilkan dari Sekolah Polisi Negara pada tiap-tiap ibu kota Provinsi/ Komando Daerah Kepolisian belum mencukupi, maka sejalan dengan Rencana Pembangunan Semesta berjalan tahap pertama dengan Ketetapan Menteri Kepala Kepolisian Negara tanggal 30 Desember 1961 No. Pol. 62/SK/MK/1961.²⁴ tentang pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN). Selain pembentukan SPN, pendidikan Kepolisian juga terdiri dari Akademi Ilmu Kepolisian (AIK) dan Staf Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak)

Kepolisian Negara dalam peran dan fungsinya merupakan alat keamanan dan pertahanan negara. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Kepolisian berperan dalam operasi-operasi Keamanan dalam negeri. Operasi-operasi tersebut adalah operasi penumpasan DI/TII di Sulawesi dan Jawa Barat, Operasi Trikora di Irian Barat, Operasi Dwikora melawan Malaysia, operasi penumpasan G30S, serta tugas Kepolisian dalam melindungi Presiden.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum lahirnya Demokrasi Terpimpin, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi Parlementer terlihat dengan banyaknya Kabinet yang ada pada masa itu. Sebanyak tujuh kabinet berganti-ganti dan setiap kabinet hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun. Pergantian yang terjadi pada kabinet mengakibatkan perubahan terhadap semua aspek-aspek yang ada pada negara Indonesia. Salah satu aspek yang berubah adalah aspek militer. Dalam dunia militer, perubahan terjadi akibat pergantian-pergantian kabinet pada masa demokrasi Parlementer. Salah satu elemen militer pada waktu itu adalah Kepolisian Negara. Kepolisian merupakan bagian dari militer yang mendapatkan kedudukan dan tugas tersendiri.

²⁴ Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 129.

Kedudukan, status, maupun organisasi Kepolisian juga berubah karena adanya perubahan kabinet yang terjadi ada pemerintahan pusat..

2. Kegagalan kabinet yang berulang-ulang jatuh bangun mengakibatkan Presiden tidak menemukan kecocokan dengan paham liberal, karena pada masa Demokrasi Parlementer liberalisme masuk dengan bebasnya dan mengakibatkan kacaunya pemerintahan. Demokrasi Terpimpin lahir dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Sementara. Demokrasi Terpimpin mengakibatkan otoriteritas dari Presiden Soekarno karena memegang kepemimpinan secara tunggal. Untuk memperkuat kepemimpinannya, maka Presiden Soekarno memegang tanggung pemerintahan disegala bidang dengan kekuasaan tunggalnya. Salah satu upaya Presiden Soekarno untuk memperkuat kekuasaannya adalah dengan cara memperkuat aspek militernya. Kepolisian merupakan bagian dari militer di Indonesia. Pada masa ini, militerisasi dilakukan pada tubuh Kepolisian dengan adanya integrasi Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu Kepolisian juga mengalami perubahan, seperti pergantian Kepala Kepolisian Negara. Pada masa ini anggota ABRI diperbolehkan menduduki jabatan pada pemerintahan (Dwifungsi ABRI), termasuk para perwira Kepolisian yang duduk di kursi pemerintahan.
3. Dinamika dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin diawali dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 19/1961. Integrasi ke dalam tubuh ABRI dilakukan untuk memperkuat militer Indonesia. Status Kepolisian dipertegas dengan pembentukan organisasi dibawah tingkat pusat. Pergantian nama Mobiele Brigade berubah menjadi Brigade Mobil seperti yang dikenal hingga sekarang. Selain itu juga didirikanlah Sekolah-sekolah Kepolisian guna mencetak perwira-perwira Kepolisian.yang pada masa ini sangat dibutuhkan untuk keperluan keamanan dalam negeri.
4. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana permasalahan keamanan dalam negeri banyak terjadi di Indonesia. dalam permasalahan tersebut, diperlukan kekuatan militer untuk penyelesaian. Kekuatan militer di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Kepolisian yang tergabung dalam ABRI ikut berperan dalam penumpasan atau operasi-operasi yang terkait dengan keamanan Indonesia. operasi-operasi tersebut antara lain Operasi Penumpasan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TI), Operasi Tri Komando Rakyat (Trihora), Operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora), dan Operasi Penumpasan Gerakan 30 September. Selain berperan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri, Kepolisian juga memiliki tugas untuk melindungi Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Atim Supomo, dkk. (1996). *Brimob Polri Jateng Dan DIY Dalam Lintasan Sejarah*. Semarang: Brigade Mobil Polri Polda Jateng.

_____. (1998). *Pelopor*. Yogyakarta: Pusdik Brimob.

Awaloedin Djamin. (2007). *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI.

Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 160. (1960). *Militerisasi Kepolisian Negara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Markas Besar Kepolisian R.I. (1970). *Almanak Seperempat Abad Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian R.I.

Memet Tanumidjaja. (1971). *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Sayidiman Suryohadiprojo. (1981). *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang*. Jakarta: Intermedia.

Sundhaussen. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3J

Reviewer

Yogyakarta,
Pembimbing

2014

Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 19740809 200812 1 001

Dr. Aman, M.Pd.
NIP. 197410152 00312 1001